

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UN Alliance for Sustainable Fashion dibentuk tahun 2019 sebagai upaya implementasi dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) di bidang *fashion*. SDGs adalah seruan universal untuk bertindak untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. 17 SDGs ini terintegrasi, yang berarti mereka mengakui bahwa perubahan yang dilakukan di satu bidang akan berdampak pada hasil di bidang lain, dan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mencapai keseimbangan antara kelestarian sosial, ekonomi, dan lingkungan (UNDP, 2022). SDGs tersebut adalah: *The SDGs are: no poverty; zero hunger; good health and well-being; quality education; gender equality; clean water and sanitation; affordable and clean energy; decent work and economic growth; industry, innovation and infrastructure; reduced inequalities; sustainable cities and communities; responsible consumption and production; climate action; life below water; life on land; peace, justice, and strong institutions; dan partnerships for the goals.* SDGs menempatkan penekanan pada komponen lingkungan, sosial, dan ekonomi yang terjalin dari pembangunan berkelanjutan dengan memposisikan keberlanjutan sebagai titik fokus tujuan (Schleicher et al., 2018). Terdapat hubungan langsung atau tidak langsung antara sektor fesyen dan tekstil dan masing-masing dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan ada banyak keterkaitan antara tujuan dan target spesifik (UNESCO, 2015).

Aliansi ini juga berfungsi sebagai platform komunikasi dan kolaborasi untuk sejumlah badan PBB yang bekerja untuk membuat *fashion* semakin berkelanjutan, termasuk *Blue Fashion* yang merupakan sebuah inisiatif dalam menggunakan bahan laut yang berkelanjutan dan melindungi tanah yang subur yang diluncurkan oleh FAO dari PBB; *Ethical Fashion Initiative* yang mendorong perajin dari negara berkembang yang diluncurkan oleh *International Trade Centre*; dan pemerintah dipaksa untuk merangsang praktik manufaktur berkelanjutan yang diinisiasi oleh *UN Environment Programm* (Nijman, 2019). Dibalik itu semua, tujuan utama dari terbentuknya aliansi ini adalah untuk mempromosikan kolaborasi, transparansi informasi, dan penjangkauan dalam mengoreksi

dari *fast fashion*. Sekretariat *UN Alliance for Sustainable Fashion* dipegang bersama oleh ITC *Ethical Fashion Initiative* dan UNEP (UN Alliance for Sustainable Fashion, 2023). Sebagaimana dipahami oleh *UN Alliance for Sustainable Fashion*, *fashion* meliputi pakaian, kulit, dan alas kaki yang terbuat dari tekstil dan barang sejenisnya. Cakupan pekerjaan Aliansi meluas dari ekstraksi dan pasokan bahan baku, pemintalan dan penenunan benang dan kain, pembuatan garmen, aksesoris dan alas kaki, hingga distribusi, konsumsi, dan akhir masa pakainya, termasuk elemen melingkar penggunaan kembali, perbaikan/penggunaan ulang, dan daur ulang bahan. Rantai nilai dari *fashion* memiliki kepentingan global, dengan jutaan pekerjaan yang melekat padanya, menghasilkan pendapatan devisa di banyak negara berkembang, salah satunya adalah Bangladesh (UN Fashion Alliance, 2021), dimana terdapat kantor beberapa aliansi-aliansi yang tergabung ke *UN Alliance for Sustainable Fashion*, seperti ILO, UNDP, UNIDO, dan UN Women dan berpusat di kota Dhaka, Bangladesh (UN Bangladesh, 2023).

Bangladesh merupakan negara produksi garmen terbesar kedua dan merupakan rumah bagi lebih dari 8.000 pabrik garmen. Ekspor pakaian jadi menyumbang 83% dari total barang yang dikirim ke luar negeri. Stabilitas Bangladesh bergantung pada industri yang dikendalikan oleh dunia Barat, karena lebih dari empat juta warga negara Bangladesh bekerja di industri ini (Bynum, 2021). Hal ini menjadikan negara Bangladesh tidak terlepas dari fenomena *fast fashion*. Merriam-Webster mendefinisikan *fast fashion* sebagai strategi untuk desain, kreasi, dan pemasaran desain pakaian yang menekankan pembuatan tren mode dengan cepat dan murah tersedia bagi konsumen (Merriam-Webster, 2022). *Fast fashion* dikontrol berdasarkan permintaan untuk memastikan bahwa pengecer memiliki stok pakaian baru dalam jumlah yang cukup sebelum tren tersebut berlalu. Permintaan Amerika dan Eropa untuk produksi Bangladesh terus meningkat, yang menghasilkan gaji yang lebih rendah dan kondisi kerja yang lebih tidak stabil (Bynum, 2021). Fokus *fast fashion* dalam memproduksi pakaian yang murah dengan siklus pergantian musim yang cepat berkesinambungan dengan kurangnya fokus pada dampak sosial dalam rantai pasokan yang berkontribusi pada bencana seperti runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh pada tahun 2013. Runtuhnya gedung tersebut yang menampung lima pabrik garmen menewaskan sekitar 1.132 orang dan melukai lebih dari 2.500 orang. Sejak bencana tersebut, tak kurang dari 109 kecelakaan terjadi. Diantaranya sekitar 35 insiden pabrik

tekstil di mana 491 pekerja terluka dan 27 pekerja meninggal (ILO, 2013). Adanya pandemi Covid-19 juga memunculkan tantangan baru dalam industri *fast fashion*. Pada Maret 2020 telah dilaporkan bahwa beberapa *brand* besar tidak memberikan upah pekerja setelah membuat pakaian senilai 40 milyar dolar yang menyebabkan munculnya kampanye #payup dalam rangka meminta *brand* tersebut bertanggung jawab atas hal yang terjadi, dimana pada akhirnya *brand* besar seperti Zara dan GAP membayar sekitar 15 juta dolar (Goodwin, 2021).

Selain itu, *fast fashion* juga memiliki dampak berbahaya bagi lingkungan, dimana Untuk memproduksi pakaian dengan cepat dan murah, pabrik garmen menggunakan pewarna dan bahan kimia beracun, dimana bahan kimia ini kemudia dilepaskan ke sungai terdekat dan mencemari pasokan air sehingga menyebabkan adanya polusi air dan meningkatkan penyakit di antara warga Bangladesh (Bynum, 2021). Adanya polusi air diakibatkan meningkatnya limbah air dari pewarna sintetis yang berbahaya yang digunakan dalam proses pewarnaan pakaian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Waterkeepers Bangladesh* pada Januari 2021, air Sungai Buriganga di Shyampur, Dhaka memiliki peringkat Indeks Kualitas Air atau *Water Quality Index* (WQI) terendah selama pengujian air dari berbagai titik sungai, dimana tingkat pH di air adalah 7.6, 6.7, dan 8.5 di pra-musim hujan, musim hujan, dan pasca musim hujan masing-masing terhadap standar level dari 7 (UNB, 2022). Sungai Buriganga merupakan salah satu sungai terbesar di Bangladesh dan mengalir melalui barat dan timur wilayah Dhaka, dimana sungai Buriganga ini dianggap sebagai sumber kehidupan kota Dhaka karena digunakan oleh penduduk untuk mandi, minum, irigasi, dan keperluan industri. Selain itu, pada tahun 2020 ditemukan bahwa sampel air dari sungai Buriganga mengandung kadar kromium dan cadmium lebih dari enam kali maksimum yang direkomendasikan oleh *World Health Organization* (AFP, 2022). Tingginya tingkat polusi di Sungai Buringaga tidak hanya membahayakan ekosistem, tetapi juga berdampak parah pada kesehatan manusia.

Berbeda dengan negara maju seperti Cina yang merupakan negara dengan produksi garmen terbesar, dampak yang didapatkan dari *fast fashion* tidak sebesar Bangladesh. Sebagai negara berkembang yang menjadi negara produksi garmen terbesar, *fast fashion* menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan, dimana pencemaran air sungai

yang terkontaminasi oleh zat kimia yang digunakan dalam proses produksi garmen, dan dampak sosial, dimana imunitas para pekerja yang kurang diperhatikan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis menarik sebuah rumusan masalah “*Bagaimana peran UN Alliance for Sustainable Fashion dalam mengatasi dampak lingkungan dan sosial dari fast fashion di Bangladesh?*”

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai salah satu syarat untuk pengajuan tesis.
2. Mengetahui peran dari *UN Alliance for Sustainable Fashion* dalam mengatasi dampak sosial dan lingkungan di Bangladesh akibat dari adanya *fast fashion*.

D. Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi, yaitu :

1. Memberikan informasi tambahan terkait perkembangan dalam isu-isu hubungan internasional kedepannya.
2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan penulisan terkait peran sebuah inisiasi dalam mengatasi dampak dari adanya *fast fashion*, terutama dibidang sosial dan lingkungan.

E. Studi Pustaka

Guna menjawab pertanyaan yang telah tercantum dalam rumusan masalah, maka penulis telah mereview tulisan atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil *literature review* yang telah dilakukan penulis.

Buku yang ditulis oleh David Lewis dengan judul *The Management of Non-Governmental Development Organizations* membahas mengenai *non-governmental organizations (NGOs)* dan pembangunan yang menggabungkan tinjauan kritis dari literature penelitian utama dengan seperangkat wawasan teoritis dan praktis terkini yang

diambil dari pengalaman di Asia, Eropa, Afrika, dan di tempat lainnya. Buku ini menjelaskan bahwa profil NGO di negara berkembang telah meningkat selama beberapa decade terakhir. NGO internasional dan lokal telah menjad pular perhatian dalam upaya internasional, nasional, dan lokal untuk memberantas kemiskinan dan sekarang dilihat sebagai elemen penting dari masyarakat sipil. Buku ini mengeksplorasi bidang manajemen NGO yang baru muncul yang bekerja di bidang pengurangan kemiskinan di negara berkembang. Dalam edisi kedua yang direvisi, buku ini menyoroti pentingnya NGO yang berkelanjutan dalam pembangunan. Keragaman NGO dan perannya dibahas dengan latar belakang sejarah yang lebih luas. Dengan menggunakan berbagai studi kasus pendek tentang intervensi yang berhasil dan tidak berhasil, penulis menganalisis bagaimana minat pada NGO telah mencerminkan dan menginformasikan tren dan perdebatan teoretis yang lebih luas dalam studi pembangunan. Dalam buku ini terdapat argument bahwa NGO merupakan pusat teori dan praktik pembangunan dan kemungkinan akan tetap menjadi aktor penting selama bertahun-tahun yang akan datang (Lewis, 2006).

Buku yang ditulis oleh M. Rezaul Islam dengan judul *NGOs, Social Capital and Community Empowerment in Bangladesh* membahas mengenai intervensi NGO dalam dua inisiatif pengembangan masyarakat, yaitu modal sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta perannya dalam mendanai dan merumuskan kerangka pembangunan di negara berkembang seperti Bangladesh dengan mempertimbangkan isu-isu wacana pembangunan dari tindakan kolektif, kepercayaan sosial dan akses ke pengetahuan, proses politik dan sumber daya keuangan, sosial, dan alam. Mencerminkan relevansi NGO untuk pengembangan masyarakat, dan manfaat, tantangan dan keterbatasan kegiatan NGO, buku ini memberikan studi komprehensif tentang partisipasi NGO dalam pengembangan masyarakat di Bangladesh dan negara-negara Dunia Ketiga secara lebih luas untuk menyoroti keprihatinan global dengan implikasi internasional (M. R. Islam, 2016).

Artikel dengan judul *Role of NGO's in Protecting Environment and Health* yang ditulis oleh M. Loganathan dan Jothi Narendiran dalam buku *Integrated Waste Management in India: Status and Future Prospects for Environmental Sustainability* menjelaskan bahwa NGO telah melengkapi diri mereka secara memadai dan muncul dengan antusias dalam memberikan layanan seperti bantuan kepada orang buta, orang cacat

dan kurang beruntung dan membantu pemerintah dalam perawatan kesehatan ibu dan anak, termasuk program keluarga berencana. Artikel ini juga membahas mengenai Kebijakan Kependudukan Nasional (NPP) 2000 dan Kebijakan Kesehatan Nasional (NHP) 2002 yang menyatakan bahwa harus ada keterlibatan yang lebih besar dari NGO dalam pelaksanaan berbagai program kesehatan dan kesejahteraan keluarga di negara ini. Sebagai pengakuan atas peran penting yang dimainkan oleh mereka, Pemerintah India mulai memberikan bantuan keuangan kepada NGO untuk berbagai skema. Peran penting yang dimainkan oleh berbagai NGO tingkat nasional dan regional secara singkat didokumentasikan dalam *Encyclopedia of Social Work in India, 1968* (Loganathan & Narendiran, 2016).

Artikel yang ditulis oleh Md. Mehedi Hasan, Mohammed Asaduzzaman Sarker, Mohammed Nasir Uddin, Md. Zulfikar Rahman, dan Baokun Lei dengan judul *Role of a Coastal NGO in Attaining Climate Resilience in Bangladesh* dalam jurnal *American Journal of Climate Change* bertujuan untuk mengetahui peran NGO pesisir bernama *Speed Trust* dalam mewujudkan resiliensi dalam menghadapi perubahan iklim di wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Kalapara di bawah Kabupaten Patuakhali. Temuan dalam artikel ini mengungkapkan bahwa peran *Speed Trust* dalam mencapai ketahanan iklim di wilayah studi bervariasi dengan perubahan aspek ketahanan iklim. Ini juga menunjukkan bahwa mayoritas menganggap gagasan bahwa *Speed Trust* memainkan peran sedang hingga sangat efektif dalam mencapai ketahanan iklim. Sementara hanya 1,2 persen yang dianggap memiliki peran yang buruk dalam mencapai ketahanan dalam menanggapi perubahan iklim (Hasan et al., 2018).

Artikel yang ditulis oleh Minisha Gupta dengan judul *Role of NGOs in Women Empowerment: Case Studies From Uttarakhand, India* dalam *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy* bertujuan untuk mengidentifikasi peran NGO dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui fasilitas penghidupan langsung. Penulis menyebutkan bahwa perempuan cukup kreatif untuk memulai usaha mereka sendiri, tetapi mereka tidak mampu menggali peluang yang ada karena dominasi laki-laki, kurangnya pendidikan dan dukungan pemerintah yang memadai. Dengan demikian, NGO memainkan peran utama dalam melatih dan memberdayakan perempuan untuk mendapatkan mata pencaharian langsung. Dari penelitian ini, penulis menemukan

bahwa pemberdayaan perempuan terjadi melalui penciptaan usaha dan kewirausahaan, yang dapat dicapai dengan pelatihan dan informasi yang tepat. Motivasi dan kepemimpinan yang efektif membantu wanita dalam mendapatkan kepercayaan diri, dan mereka bertujuan untuk mencapai tujuan mereka. Informasi yang tepat tentang kebijakan pemerintah, jaringan dengan pelanggan, hubungan dengan kelompok swadaya (*self-help groups*) dan NGO juga membantu mereka dalam mencapai pemberdayaan (Gupta, 2021).

Artikel dengan judul *The Role of NGOs in Sustainable Supply Chain Management: A Social Movement Perspective* yang ditulis oleh Sujie Peng, Fu Jia, dan Bob Doherty dalam Jurnal *Supply Chain Management* ditulis dengan tujuan untuk meninjau literatur akademis tentang peran NGO dalam *sustainable supply chain management* (SSCM) untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual. Artikel ini mengadopsi teori gerakan sosial dan dalam artikel ini mengusulkan empat langkah dan enam proposisi dalam proses NGO membina SSCM. Ini termasuk perampasan relatif, peluang politik, mobilisasi sumber daya dan tindakan kolektif, yang berdasarkan mana kami mengembangkan kerangka kerja konseptual mengenai peran NGO dalam meningkatkan keberlanjutan dalam rantai pasokan. Model konseptual yang diusulkan membuka jalan baru penelitian dalam literatur NGO dan beberapa arah untuk penelitian lebih lanjut (Peng et al., 2022).

Buku yang ditulis oleh Shikha Silliman Bhattacharjee dengan judul *Fast fashion, production targets, and gender-based violence in Asian garment supply chains* membahas mengenai kekerasan berbasis gender yang ada dalam industri garmen, dimana hal tersebut merupakan hasil yang dapat diprediksi dalam sebuah industri di mana pekerja perempuan menjadi bawahan, peran pekerjaan berupah rendah didorong untuk memenuhi target produksi yang menuntut untuk mengikuti tren *fast fashion*. Buku ini juga membahas mengenai model Kesepakatan Bangladesh yang menjelaskan kewajiban substantif pada *brand* dan pengecer pakaian jadi melalui perjanjian yang mengikat dan dapat ditegakkan secara kontrak yang dikembangkan dan diimplementasikan dalam kemitraan dengan pekerja dan serikat pekerja (Bhattacharjee, 2019).

Artikel dengan judul *Sewing Responsibility: Media Discourse, Corporate Deviance, and the Rana Plaza Collapse* yang ditulis oleh Sarah Hupp Williamson dan Jennifer Lutz mengambil runtuhnya Rana Plaza sebagai studi kasus mengenai bagaimana

wacana media mengkonstruksi gagasan tentang penyimpangan perusahaan, tanggung jawab, dan manajemen risiko dalam rantai pasokan global dengan menggunakan artikel surat kabar dari AS dan Bangladesh untuk analisis konten, dimana artikel ini memperluas literatur kejahatan korporasi dan tata kelola risiko global untuk memasukkan industri *fast fashion*. Artikel ini menemukan sedikit bukti bahwa kedua negara tersebut membahas Rana Plaza sebagai penyimpangan perusahaan atau penghukuman pidana terhadap perusahaan dan menemukan bahwa tata kelola risiko global dinasionalisasi karena surat kabar AS mengalihkan kesalahan dari perusahaan AS dan ke Bangladesh (Williamson & Lutz, 2020).

Artikel yang ditulis oleh Ramona Vijeyarasa dan Mark Liu dengan judul *Fast Fashion for 2030: Using the Pattern of the Sustainable Development Goals (SDGs) to Cut a More Gender-Just Fashion Sector* membahas studi kasus tentang runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh pada tahun 2013 yang membawa visibilitas global terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh pekerja perempuan di sektor garmen. Dalam artikel ini disarankan bahwa akuntabilitas yang lebih besar dapat dicapai melalui penerapan pemahaman hak asasi manusia yang diinformasikan tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mempromosikan keadilan gender di sektor tersebut dan menunjukkan bagaimana keberlanjutan dan keadilan gender berkaitan erat serta menggambarkan peran apa yang dapat dimainkan SDGs dalam mempromosikan hasil berkelanjutan yang adil. Artikel ini mengangkat seperangkat enam persyaratan untuk memastikan perspektif gender terhadap peran industry fashion dalam mengimplementasikan SDGs (Vijeyarasa & Liu, 2022).

F. Kerangka Teori

Peran *Non-Governmental Organization* (NGO)

NGO adalah organisasi yang dikelola oleh para profesional dan memiliki tujuan memberikan kontribusi untuk pengurangan penderitaan manusia dan pembangunan negara-negara terbelakang (Streeten, 1997). Mereka mencapai tujuan ini dalam berbagai cara, seperti melalui penyediaan dana untuk prakarsa, berpartisipasi dalam penyediaan layanan dan pembangunan kapasitas, berkontribusi terhadap kesadaran, dan mendorong banyak organisasi tempat mereka bekerja untuk mengorganisir diri mereka sendiri (Baccaro, 2001). Sementara ini berlangsung, Desai (2005) mengatakan bahwa NGO

memiliki peran penting dalam membantu perempuan, laki-laki, dan rumah tangga, dan diantisipasi bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan. Dia memberi contoh peran dan fungsi yang dimainkan NGO, seperti memberikan layanan konseling dan dukungan, meningkatkan kesadaran dan mengadvokasi penyebab, bantuan hukum, dan keuangan mikro. Layanan ini membantu individu dalam mencapai potensi mereka dalam hal bakat, keterampilan, dan pengetahuan, serta mendapatkan kembali kendali atas hidup mereka sendiri dan pada akhirnya mendapatkan pemberdayaan (Desai, 2005).

Stromquist (2002) mengidentifikasi tiga fungsi utama yang dilakukan oleh NGO. Fungsi-fungsi tersebut meliputi: penyampaian layanan (seperti bantuan, kesejahteraan, dan keterampilan dasar); penyediaan kesempatan pendidikan (seperti keterampilan dasar dan sering analisis kritis terhadap lingkungan sosial); dan promosi kebijakan publik (Stromquist, 2002). Baccaro (2001) menunjukkan bagaimana NGO tertentu dapat mempromosikan pengorganisasian dan “pemberdayaan” kaum miskin, khususnya perempuan miskin, melalui kombinasi kredit mikro, peningkatan kesadaran, pelatihan bagi anggota kelompok, dan layanan sosial lainnya (Baccaro, 2001). Pemberdayaan adalah kemampuan individu untuk memperoleh kontrol sosial, politik, ekonomi dan psikologis melalui akses informasi, pengetahuan dan keterampilan; pengambilan keputusan; dan *self-efficacy* individu, partisipasi masyarakat, dan kontrol yang dirasakan (Rappaport, 1987; Zimmerman & Rappaport, 1988).

Gelombang globalisasi telah menimbulkan tantangan terhadap efisiensi negara dan institusi birokrasinya, terutama yang terpusat di tingkat politik, administrasi, ekonomi, dan keuangan. NGO di negara-negara berkembang memainkan peran penting dalam pembangunan. Mereka bekerja untuk mereformasi kebijakan yang ada dan seringkali merupakan mekanisme di mana anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses politik dan kebijakan. NGO telah berperan penting di banyak bidang, salah satunya adalah advokasi (Tshiyoyo, 2022). Upaya untuk memodifikasi atau mengubah kebijakan publik agar lebih mengakomodasi keinginan atau kepentingan individu yang menuntut perubahan tersebut adalah contoh advokasi. Proses yang dikenal sebagai advokasi mencakup berbagai tindakan berbeda yang dilakukan dengan maksud berdampak pada pengambilan keputusan. Tujuan untuk mempengaruhi hasil, seperti kebijakan publik dan keputusan alokasi sumber

daya yang dibuat dalam sistem dan institusi politik, ekonomi, dan sosial, adalah inti dari advokasi. Salah satu instrumen dan proses demokrasi yang dapat digunakan warga negara untuk memantau dan melindungi kepentingan mereka sehubungan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah adalah advokasi. Warga negara dapat memantau dan melindungi kepentingan mereka terkait dengan kebijakan dengan berpartisipasi dalam advokasi (Azizah, 2014).

Menurut Lewis, terdapat tiga peran yang dimainkan oleh NGO, yaitu *implementers*, *catalysts*, dan *partners*. Dalam konteks pengiriman barang dan jasa sebagai bagian dari proyek yang sedang dilakukan baik oleh LSM itu sendiri, oleh pemerintah, atau oleh organisasi donor, pelaksana ditugaskan untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan. Ini termasuk program dan proyek yang dikembangkan oleh organisasi non-pemerintah (NGO) untuk memberikan layanan kepada masyarakat (seperti perawatan medis, kredit, penyuluhan pertanian, nasihat hukum, atau bantuan darurat), selain pertumbuhan 'kontrak', di mana NGO dilibatkan oleh pemerintah atau donor untuk melakukan tugas tertentu, dengan ketidakseimbangan pembayaran. Organisasi nonpemerintah (NGO) yang memotivasi, membantu, atau berkontribusi pada perubahan individu atau organisasi secara kolektif disebut sebagai katalisator atau katalisator. Ini termasuk pertumbuhan organisasi dan kelompok akar rumput (selain pembangunan "modal sosial"), pemberdayaan pendekatan pembangunan, lobi pekerjaan dan advokasi, inovasi di mana NGO berusaha untuk mempengaruhi undang-undang, dan kampanye pekerjaan. Contoh lain termasuk advokasi dan mengkampanyekan kesempatan kerja. Sebagai bagian dari tugas mereka sebagai *partner*, NGO semakin banyak bekerja berdampingan dengan pemerintah, donor, dan sektor swasta dalam proyek bersama. Selain itu, peran mitra atau mitra melibatkan hubungan yang rumit antara lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbeda, seperti "peningkatan kapasitas". Kemitraan nyata diperlukan untuk organisasi nonpemerintah jika mereka ingin mencegah ketergantungan, pilihan kolaboratif, dan pergeseran tujuan (Lewis, 2006).

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesa bahwa peran UN Alliance for Sustainable Fashion dalam mengatasi dampak lingkungan dan sosial dari fast fashion di Bangladesh adalah:

1. Sebagai *Advocator*: meluncurkan Platform Dialog yang mengusulkan kebijakan Pengembangan Dana Transformasi Hijau senilai \$200 juta dengan Bank Bangladesh.
2. Sebagai *implementer*: menyediakan fasilitas medis (pusat kesehatan dan pusat rehabilitas bagi pekerja yang mengalami cedera karena kecelakaan kerja) dan fasilitas khusus (ruang laktasi bagi pekerja perempuan)
3. Sebagai *partner*: melakukan kolaborasi global dengan Fast Retailing Co., Ltd untuk memperjuangkan hak dan pemberdayaan perempuan dalam industri garmen.

H. Jangkauan Penelitian

Penentuan jangkauan penelitian dalam melakukan penelitian sangat diperlukan untuk menghindari meluasnya topik bahasan. Penulis membatasi jangkauan penelitian dari setelah insiden Rana Plaza di Bangladesh terjadi, pada tahun 2013 sampai tahun 2022 untuk membantu proses penelitian.

I. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literature menganalisa buku-buku, jurnal, tesis, disertasi, artikel online, berita, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini adalah peran *UN Alliance for Sustainable Fashion* dalam mengatasi dampak *fast fashion* di Bangladesh. Dalam analisa data, teknik yang digunakan adalah analisis kualitatif karena sifat data penelitian ini merupakan informasi kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang diucapkan dari para pelaku yang diamati.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan

penelitian. Kelima bab tersebut yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, pembahasan hasil penelitian, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan penjelasan yang berisikan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, rumusan masalah, studi pustaka, kerangka teori, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, metode analisis data, sistematika penulisan.

BAB II

Dalam bab ini, penulis akan menggambarkan terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs), isu lingkungan pada industri garmen, *UN Alliance for Sustainable Fashion*, dan *fast fashion*.

BAB III

Dalam bab ini, penulis akan menggambarkan mengenai sejarah industry garmen di Bangladesh, pertumbuhan *Ready-Made Garment* (RMG) Bangladesh, Isu lingkungan dan isu sosial terkait RMG di Bangladesh.

BAB IV

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil analisis mengenai peran *UN Alliance for Sustainable Fashion* dalam mengatasi dampak dari *fast fashion* di Bangladesh

BAB V

Kesimpulan